

PASANG SURUT PERPOLITIKAN ISLAM DALAM KANCAH SEJARAH

Mansur

Pengawas Pada Kementrian Agama Kabupaten Lombok Tengah

Abstrack

This paper discusses the ups and downs of Islamic politics in the historical arena, the politics referred to in this paper is photographing the history of politics at the time of the Caliph or Companions and politics in the history of Islam. Political Islam is often seen as a combination of “religion and politics”. The relationship between politics and religion is interrelated and inseparable, although technically and practically the relationship is distinguished, religion is the authority of Shahibu as-Shari’ah, while politics is public / human authority. But these two things go hand in hand just as the Islamic religion developed as a religious and political movement which in turn merged with the “public” state and society. The belief of a Muslim who considers that Islam is something that concerns the faith and politics and is rooted in the holy book of Islam “al-Qur’an” and the hadith of the Prophet, so that Muslims believe that this has been reflected in the teachings of Islam, its history, and political development.

Key Word: *Pasang Surut Politik, Agama, Pemimpin, Sejarah Islam*

A. Pendahuluan

Dalam ajaran islam, masalah politik termasuk dalam kajian fiqih siyasah. *Fiqih siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam.

Al Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana system politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh. Ini berarti kekuasaan politik terkait dengan kedua factor tersebut. Pada sisi lain politik juga terkait dengan ruang dan waktu. Ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaanya tiak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan.¹

Agama dan politik merupakan dua hal yang sangat menarik, dua opsi yang masing-masing menurut latar-belakang historisitas kemunculannya, perkembangan, dan tujuannya berbeda, akan tetapi sangat sulit untuk dipisahkan. Karenanya diskusi dan pembicaraan seputar hal ini merupakan wacana yang tidak akan pernah kering, mengingat dunia tidak akan luput dari kedua hal tersebut. Menurut Nurcholish Madjid, hal ini disebabkan oleh tiga sebab; *Pertama*, disebabkan kekayaan sumber bahasan, sebagai buah dan konsekwensi dari lima belas abad pengalaman sejarah akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. *Kedua*, kompleksitas permasalahan, sehingga setiap pembahasan dengan sendirinya tergring untuk memasuki satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas, pembahasan yang menyeluruh akan menuntut kemampuan yang menyeleuruh pula disamping kesadaran untuk tidak terjerumus kedalam reduksionisme dan kecendrungan penyederhanaan persoalan. Dan *Ketiga*, pembahasan tentang agama dan politik terutama agama Islam akan berlangsung terus-menerus

1 Abd. Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah:Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm 56

karena sifatnya yang melibatkan ideologis dari berbagai kelompok masyarakat terutama umat Islam itu sendiri.

Hubungan antara politik dan agama saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, kendati secara teknis dan praktis hubungan itu dibedakan, agama merupakan wewenang *shahibu as-Syariah*, sementara politik merupakan wewenang public/manusia. Akan tetapi kedua hal tersebut berjalan bersamaan seperti halnya agama Islam yang berkembang sebagai gerakan keagamaan dan politik yang pada gilirannya menyatu dengan negara dan masyarakat “*public*”. Kepercayaan seorang muslim yang menganggap bahwa agama Islam merupakan hal yang menyangkut tentang keimanan dan politik serta berakar pada buku kutsal agama Islam “al-Qur’an” dan hadits Nabi, sehingga muslim itu percaya bahwa hal tersebut telah tercermin dalam ajaran Islam, sejarahnya, serta perkembangan politiknya. Dari sinilah kemudian dunia Islam mengenal berbagai variasi sepanjang sejarah tentang politik dan sistem pemerintahan yang berkembang dari masa ke masa.²

Politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan “agama dan politik”. Dalam istilah gerakan Islam modern, Islam adalah *din wa ad-Daulah* (agama dan kekuasaan), pandangan ini didukung oleh lebih dari empat puluh referensi di dalam al-Qur’an tentang perlunya “*ketaatan kepada Allah, nabi-Nya serta orang-orang yang memegang kendali kepemimpinan* - hingga tidak sedikit intelektual muslim maupun non muslim yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan tidak mengenal kependetaan atau kelembagaan formal “gereja”, akan tetapi pada zaman kejayaan imperium Muslim dinasti Umayyah dan Abbasiyah pada abad pertengahan telah berkembang struktur-struktur di luar negara yang berperan penting dalam kehidupan iman dan perilaku keagamaan.

Dalam politik Islam terdapat konsep-konsep yang sangat

2 Djazuli, Fiqih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), 34

banyak, telah dirumuskan oleh para ahli yang menekuni syari'at Islam dan orang-orang yang berminat untuk mengedepankan ajaran Islam atas pergolakan kekuasaan, hal ini juga didukung oleh al-Qur'an, diantaranya adalah konsep *khalifah* dan *khilafah*, *ummah* dan *imamah*, *syura*, *jihad*, keadilan, kesamaan derajat, perlindungan terhadap yang lemah, penjagaan hak "agama, keturunan, akal, harta dan jiwa". Berikut akan dijelaskan masing-masing elemen di atas.

B. Pembahasan

1. Pasang Surut Politik Islam Dalam Kancah Sejarah

Sejarah politik Islam sangatlah kompleks, karenanya untuk menguak dan mengetahui esensi "konkritnya" politik Islam yang hendaknya dilakukan adalah merumuskan kembali *I'adaat at-tarkib* "restrukturisasi" persoalan ini sejarah jernih dan kritis. Disinilah penulis melihat urgensinya pendekatan sejarah yang nantinya akan digunakan dalam penelusuran dan pengungkapan kembali fakta-fakata sejarah.³³

Sebagai titik awal dan sekaligus menjadi mata rantai yang harus dilalui dalam penelusuran alur sejarah peradaban Islam, berikut akan dipaparkan secara global proses percaturan politik dalam Islam bermula dari terbentuknya negara Madinah, hingga pada pergantian pemerintahan masa khulafaurrasyidin. Tentunya hal ini hanya sekedar langkah awal atau pengantar dari pemaparan yang mana kritik dan analisisnya akan dikedepankan pada bab-bab berikutnya.

Secara histories, berdirinya Negara Islam Madinah merupakan

³³ Pendekatan sejarah adalah suatu penclekatan yang betul-betul menekankan sikap kritis dan rasional, artinya: telaah histories terhadap politik Islam tidak saja diidentikan dengan uraian deskriptif atau penuturan kronologis suatu peristiwa. Dan bukan pula sekedar memindahkan apa yang terdapat dalam teks-teks lampau, dari bahasa kuno "tempo dulu" ke bahasa modern dan kontemporer, atau mengandalkan sekian banyak literature yang menggunakan bahasa asing (Inggris, Prancis, Jerman, begitu dan seterusnya). Akan tetapi menilai sejarah harus disertai dengan suatu kesadaran untuk membongkar system pemikiran (nalar) yang melingkup dan dominan dalam suatu tahap atau satu episode sejarah tertentu.

manifestasi dari eksistensi negara Islam pertama dalam dunia Islam dan Nabi sekaligus sebagai kepala Negara saat itu. Dan perkembangan berikutnya khususnya masa-masa khulafaurrasyidin, tema politik Islam Muncul, bahkan meruapakan isu sentral dalam dunia Islam saat itu clan hingga kinipun masih tetap rnerupakan wacana umum, mulai dasi siapa yang berhak menjadikhalifah (pemirnpin), dan apa kreteria serta materi apa saja yang harus dipenuhi seseorang pemimpin urnat dan sebagainya. ekspansi Islam besar-besaran ke semenanjung bahkan luar jazira Arabia pun terkait erat dengan kredibilitas seorang pemimpin. Semua ini menunjukkan bahwa perpolitik khususnya politik Islam dalam dunia Islam sangat dibutuhkan.⁴

Apabila memperhatikan masa-rnasa awal sejarah perkembangan Islam (masa Nabi Muhammad), akan diperoleh gambaran yang sangat jelas bahwa historisitas Islam beriring bersamaan dengan beragam pergolakan politik intern maupun ekstern urnat Islam. Fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri adalah pembelotan orang-orang Yahudi terhadap diktum-diktum yang tertera dalam Piagam Madinah, terjadinya Perjanjian Hudaibiyah dan pernbatalan sepihak oleh orang-orang non-muslim serta peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan non muslim, (*Ghazwah*)⁵ (*sariyah*).⁶

Bahkan pada saat-saat Nabi mengalami sakit kritis, hingga menemui ajalnya, Nabi masih sempat mempersiapkan pasukan Usamah bin Zaid bin Haristah yang hendak menuju utara Arabia ke kerajaan Bani Gassa.n yang merupakan wilayah imperium R0mawi_ Kenyataan ini menjadi dasar bagi kaum muslimin maupun non-muslim untuk berpandangan bahwa Islam adalah Agama yang terkait erat dengan masalah-masalah politik dan kenegaraan.⁷ Atau antara

4 Amin Husaen Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2010), hlm 55

5 Rahmat Tohir, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press.2001), hlm 41

6 Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm 23

7 Sejalan dengan pandangan tersebut Badri Yatim ketika membahas riwayat

Islam dan politik sulit untuk diceraikan satu dengan yang lainnya.

Pada hari Senin, tanggal 12 Rabi'ul Awwal 11 H bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 M, Rasulullah wafat. Beliau tidak pernah pernah berwasiat tentang siapa dan kelompok mana yang harus menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam sepeninggalnya. Kalau boleh dianalisa rupanya Nabi bernaksud memberikan pendidikan politik kepada umat Islam oleh karena prinsip-prinsip utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan telah dicontohkannya melalui praktik nyata selama periode Madinah. Maka beberapa saat sepeninggalnya, pergolakan politik intern umat Islam mulai merebak, kaum Ansar dan kaum Muhajirin berselisih pendapat dan masing-masing mengklaim diri sebagai yang paling berhak atas kepemimpinan umat Islam pasca Nabi.

Sa'ad bin Ubadah salah seorang tokoh Ansar, mengagas pertemuan di Balai Bani Sa'idah di kota Madinah, pertemuan tersebut dihadifi pula oleh sejumlah tokoh dari kelompok Muhajirin seperti Abu Bakar Assiddiq, Umar ibnu al-Khattab, Abu Ubaidah ibnu Abi Jarrah. Masing-masing pihak (Anshar dan Muhajirin) mengemukakan argumen yang kuat dan berdasar pada fakta sejarah. Akan tetapi pada akhirnya, secara aklamasi, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama yang menggantikan Nabi. Pelantikan dan pembaiatan pun segera dilakukan.⁸

Selama masa kekhilafahannya yang berlangsung sekitar dua tahun mulai tahun 632-634 M, Abu Bakar, hampir seluruh masa pemerintahannya dipergunakan untuk menghadapi pergolakan-pergolakan politik baik yang terjadi didalam negeri maupun dengan pihak luar negeri. Pergolakan didalam negeri terkait perang *riddah* menghadapi nabi-nabi palsu dan pengingkar zakat yang sangat

hidup Nabi Muhammad: sejarah dan perjuangan sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW, di samping sebagai pemimpin agama, juga seorang negarawan, pemimpin politik dan administrator yang cakap. Hal senada juga dikemukakan oleh seorang orientalis Inggris W. Montgomery Watt menulis buku yang berjudul *Muhammad, Prophet and Statesman* (Muhammad, Nabi dan negarawan).

8 Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 632 M.

membayakan dan menggerogoti agama Islam dari dalam. Sedangkan pergolakan dengan pihak luar negeri adalah perang yang terjadi antara umat Islam dengan Romawi di timur dan Parsia di barat, yang sejak awal telah melakukan provokasi di beberapa wilayah Islam, hingga dikhawatirkan akan mengancam keamanan kaum muslimin secara umum.⁹

Menjelang meletusnya perang Yarmuk, ketika pasukan Islam mulai bergerak menuju Palestina, Irak dan kerajaan Hirah, tiba-tiba pasukan Islam dikejutkan oleh berita tentang meninggalnya sang *khalifah*. Akan tetapi berkat strategi dan kebijakan yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah ibnu Abi Jarrah yang disepakati Khalid bin Walid tentang teknis penyampaian berita tersebut kepada pasukan Islam yang sedang bertempur, maka berita wafatnya sang khalifah tidak berpengaruh terhadap militansi pasukan Islam itu.¹⁰

Ketika dalam sakit keras dan beberapa saat sebelum menghembuskan napas terakhir, Abu Bakar mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan dikalangan umat Islam. Akan tetapi beliau terlebih dahulu meminta pendapat para sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Tolhah bin Ubaidillah.¹¹ Zaman pemerintahan Umar, Madinah menjadi negara adi kuasa, pada masa ini situasi politik dan keamanan dalam negeri sangat stabil dan mantap. Pergolakan politik banyak terjadi dengan pihak luar dan pada masa inilah gelombang ekspansi secara besar-besaran dimulai.¹² Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, Wilayah Islam meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebahagian besar wilayah

9 Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, Cet II, hal:36.

10 Abil Baker meninggal dunia pada bulan Agustus (634 M), dalam usia 63 tahun, di makam pada bekas rumah putrinya Aisyah binti Abi Baker, di samping makam Nabi Besar Muhammad. Joesoef Souyb, *Sejarah Daulat Khulafaurrosyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979., Cetakan Pertama, hal:127.

11 Umar resmi menjadi khalifah pada tahun (634 M) dan menjadi khalifah selama sepuluh tahun yaitu dari tahun (634-644 M).

12 Joesoef Souyb, hlm: 136 - 137.

Persia, dan Mesir.¹³

Umar mendadak menemui ajalnya oleh tikaman seorang pemuda Parsia fanatik pada tahun (644 M). Orang dengan jelas mengetahui bahwa pembunuh itu seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu' Lu'ah. Kasus itu merupakan bagian dari intrik politik di daerah pendudukan sebagai konsekuensi luasnya kawasan yang ditangani kekhalifahan. Sebelum rnenernui ajahqya, Umar rnenrbentuk majlis khusus untuk pemilihan khalifah berikutnya. Majlis atau panitia pemilihan itu terdiri dari enam sahabat dari berbagai kelompok sosial yang ada. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubaer bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Zubaer. Namun pada saat pemilihan berlangsung ternyata Talhah tidak sempat hadir, sehingga hanya lirna dari enarn anggota panitia yang melakukan pemilihan. Majlis pcrnilihan yang diketuai Abdurrahman bin Auf itu/ secara bulat memilih Utsman bin Affan, seorang keturunan bani urnayyah, meski di masa Rasul keluarga tersebut pernah menjadi musuh Islam.¹⁴

Peristiwa terpilihnya Utsman bin Affan, yang malalui perwakilan uamat Islam "*majlis* sura" dan berlangsung secara wajar, dalam animo kaurn rnuslimin waktu itu, hal ini suatu hal yang wajar dan meurpakan suatu langkah inovatif untuk menjamin ketentrman persemakmuran

13 Harun Nasution mcngatakan di zarnan Umar gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) mula-mula ke kota Syria, Damaskus (635 M) dan setahun kemudian, setelah cntara Bizantiurn kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh dibawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir dibawah pirnpinan Amr ibn Ash dan ke Irak dibawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqash. Iskandaria, ibu kota Mesir ditaklukkan tahun (641 M). Dengan demikian Mesir jatuh kebawah kekuasaan Islam. Al»Qadisiyah, sebuah kota dekat I-Iirah di Irak jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun (641 M), Mosul dapat dikuasai. Harun Nasution, Islam Ditinjau dart Berbagai Aspeknya, Jilid I, Jakarta: UI Press, Cet. V, t.th., hlm: 58.

14 Abu Su'ud, Islamologi Sejarah, Aiaran, dun Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia, Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2003, Cet. I., Hal: 60., Usrnan resrni menjadi khalifah pengganti Umar pada tahun (644 M) setelah dibaiat oleh para tokoh sahabat clan kaum muslimin. Pada waktu itu beliau suclah berumur 70 tahun, usia yang tidak bisa lagi dianggap enexjik bagi seorang yang diberikan beban mengurus negara yang bcgitu luas wilayahnya.

Islam. Akan tetapi tanggapan berbeda datang dari Bani Umayyah (keturunan Mu'awiyah bin Abi Shofyan). Peristiwa terbai'atnya Utsman bin Affan r.a sebagai khalifah, diartikan, sebagai awal kemenangan Bani Umayyah atas orang-orang Bani Hasyim.¹⁵ Hal ini tidak relevan dengan apa yang telah ditentukan dan digariskan Islam sehubungan dengan *musawah*, *ta'aruf* dan *ta'awun*. Yang digusung oleh Rasulullah SAW. Di mana dalam ide ini tidak ada perbedaan siapapun di mata Tuhan. Dan seseorang maupun kelompok tertentu tidak berhak memandang diri dan kelompoknya lebih tinggi dari orang dan kelompok yang lainnya, atau memarjinalkan kelompok lainnya.

Proses pemilihan terhadap Utsman bin Affan memang berjalan cukup demokratis kendati pada waktu tersebut terjadi persaingan ketat antara kelompok yang pro Ali bin Abi Thalib dengan kelompok yang pro Ustman bin Affan. Pengangkatan seorang khalifah melalui pemilihan yang dilakukan oleh sebuah tim di mana salah satu dari enam orang anggota tim *Ahlu syura* tersebut berhak dipilih dan memilih, merupakan proses demokrasi pertama pertama dalam sejarah kekhalifahan ummat Islam.¹⁶

Ketika Utsman bin Affan r.a terpilih sebagai khalifah, penyakit sukuisme dan kekabilahan, sebagai impelementasi dari tanggapan yang berbeda atas terpilihnya Utsman bin Affan, dimunculkan kembali dan malah dibesar-besarkan oleh orang-orang Bani Umayyah. Imam Ali r.a¹⁷ dan orang-orang dari Bani Hasyim lainnya, dinilai oleh kelompok Bany Umayyah sebagai kelompok yang tengah mengalami kekalahan dalam persaingan melawan Utsman bin Affan, yang berasal dari Bani Umayyah. Padahal Utsman bin Affan sendiri pada saat terbai'at sebagai khalifah, sama sekali tidak menyimpan fikiran seperti yang

15 Karena Usman bin Affan merupakan keturunan dari Mu'awiyah bin Abi Shofyan

16 Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Khalifah Abu Bakar dipilih dan diba'at langsung oleh kaum muslimin. Khalifah Umar ditetapkan berdasarkan wasiyat khalifah pendahulunya yaitu Abu Bakar.

17 Demikian kelompok Bany Hasyirn menyebutnya.

diteriakkan oleh kerabatnya.¹⁸

Klaim senada dari tokoh-tokoh Bani Umayyah tersebut semakin jelas ketika para pejabat penting masa khalifah Utsman lebih banyak berasal dari kaum kerabatnya. Maka dari sinilah berawal sebuah kekecewaan umat Islam kala itu. Salah seorang pejabat tinggi yang juga kerabat khalifah dan paling banyak mendapat sorotan masyarakat adalah Marwan bin Hakam. Dia dianggap terlampau jauh mencampuri kewenangan khalifah, hingga timbul setemen bahwa yang menjalankan pemerintahan sesungguhnya adalah Marwan bin Hakam, sementara Utsman bin Affan hanyalah sebuah symbol yang menyandang gelar khalifah.

Pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan, pergolakan antara umat Islam “intern” tidak dapat teralihakan lagi, mengingat tidak sedikit dari kaum muslimin yang merasa tidak puas dengan roterika pemerintahan Utsman bin Affan, dan sekaligus menganggap bahwa Utsman bin Affan sangat lemah dan bahkan tidak mampu untuk mengendalikan negara pada saat itu. Sehingga banyak terjadi pergolakan-pergolakan baik terjadi di dalam wilayah Islam maupun di luar. Kendati demikian, ekspansi yang sudah dirintis sejak awal terbentuknya negara Madinah, ditindak lanjuti ke Afrika dan Iskandariayah. Kendati kondisi intern umat Islam pada Waktu belum stabil, akan tetapi dalam ekspansi ini kemenangan masih dapat di raih.¹⁹

18 AL-Husaini Abhamid, *Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib* r.a. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Islam, t.th., hlm 135 - 136. Dan untuk ketahui bahwa asumsi ini pula di dasari karena Usman bin Affan r.a seorang sahabat dekat Rasul Allah saw bahkan sampai dua kali ia menjadi menantu Nabi.

19 Mengenai ekspansi ke Afrika dikatakan bahwa dalam perang ini kaum muslimin berhasil meraih *ghanimah* (harta rampasan perang) yang sangat banyak sehingga dikatakan, bahwa bagian pasukan kavaleri mencapai tiga ribu dinar dan pasukan invantri mencapai satu ribu dinar. Adapun tentang pertempuran dilaut Medeterian dijelaskan bahwa pada tahun (34 H) meletuslah perang di laut Putih (laut Medetaerian) dekat kota Iskandariyah, antara Abdullah bin Sa'ad dengan Romawi dibawah komando raja mereka. Perang ini dimenangkan pihak tentara Arab dan perang tersebut dalam sejrak dikenal dengan sebutan perang *As Suwari* atau perang *Dzatu As Suwari* mengingat banyak perahu/kapal yang dilibatkan didalamnya. Dalam peristiwa tersebut dikatakan, bahwa kapal yang dilibatkan

Abdullah bin Zubaer kembali ke Madinah dengan membawa *ghanimah* (harta rampasan perang) yang diperoleh dari perang tersebut. Khalifah Utsman pun bahagia karenanya dan dia diminta agar berpidato dihadapan masyarakat luas: ketika itu ia berkata: “*wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya aku menghibahkan kepadamu apa yang aku bawa dari mereka*”. Berdirilah khalifah Utsman bin Affan dihadapan masyarakat untuk menyambut mereka dengan berkata, sesudah ia memanjatkan puji syukur kepada Allah dan menyanjung-Nya: “*wahai kaum muslimin! Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kemenangan kepada kalian atas Afrika. inilah Abdullah bin Az Zubair yang telah mengabarkannya kepada kalian, dengan seizin Allah*”.²⁰

Pergolakan didalam negeri kaum muslimin juga merebak terutama pada paroh terakhir dari masa kekhaifahannya. Kaum oposisi muncul di mana-mana- reaksi secara terbuka mulai terjadi, rakyat menganggap khalifah Utsman bin Affan tidak tegas lagi, tidak bijak dan nepotis. Haekal Husain mensenyalir bahwa Kufah adalah sumber pemberontakan pertama pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, hal ini dikarenakan oleh banyaknya penduduk yang mengeluhkan para pejabat dan para petinggi kota itu “kerabat khalifah Utsman bin Affan” dianggap kurang tepat untuk memimpin mereka dan mengatur urusan Islam. Dalam pandangan mereka masih banyak orang lain yang bukan kerabat Khalifah Utsman bin Affan, lebih cocok dan pantas untuk mengatur urusan orang-orang Islam.²¹

Sementara menurut pendapat Said Al-Afghani sejarawan Islam terkemuka dalam bukunya *Aisyah wa al-Siyasah* sesuai yang dikutip oleh H.M.H A1-Hamid A1-Husaini menyebutkan bahwa krisis politik yang menggoncangkan Khalifah Utsman r.a. di Madinah prosesnya bermula dari Mesir.²² Terlepas dari perbedaan pendapat

berjumlah seribu dan dua ratus diantaranya kepunyaan kaum Muslimin.

20 Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2001, Cet.I., hal: 498-499.

21 Haekal Husain Muhammad, *Usman bin Affan antara Kekhalifahan dan Kerajaan*, Jakarta: PT. Pustaka litera Antar Nusa, Cetakan pertama, 200), hlm 76.

22 A1-Husaini A1-Hamid, Op. Cit, hal:155

tersebut, yang jelas bahwa pergolakan politik dalam negeri yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan, memang sangat dahsyat dan berakhir dengan pengepungan terhadap rumahnya sehingga membawa kematiannya ditangan pemberontak yang terjadi pada tahun (655 M).²³

Sesudah Utsman bin Affan wafat kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib sekitar tahun (656 M). Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah dilakukan dengan secara langsung dan bai'at dilaksanakan di masjid Nabawi oleh kaum muslimin di kota Madinah dan didukung oleh seluruh pasukan yang sebelumnya dikirim dari Mesir, Basrah dan Kufah dalam rangka membela khalifah Utsman. Ibnu Sa'ad berkata semua sahabat membai'atnya sebagai khalifah disebutkan bahwa Thalhah dan Zubair membai'atnya dengan sangat terpaksa dan bukan dengan suka rela.²⁴

Penulisan dan kajian tentang khulafa'urraasyidin sudah sangat banyak dilakukan baik oleh para penulis baik muslim maupun non muslim akan tetapi hal tersebut sebahagian besar baru menyentuh aspek sejarah, walaupun ada yang meneliti dari aspek politik tetapi belum ada studi spesifik yang secara khusus membahas pergolakan politik dari sisi pendidikan politik. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti pergolakan politik masa khulafa'urraasyidin dari aspek pendidikan politik. Itulah salah satu alasan mengapa kemudian masalah ini diangkat untuk dikaji ulang, guna mencari beberapa jawaban yang lebih akurat seputar persoalan-persoalan yang nantinya akan dipaparkan melalui rumusan dan tujuan penelitian.

23 Khalifah Usman bin Affan menjadi khalifah selama dua belas tahun yakni mulai tahun (644-655 M). Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Usman tersebut dalam istilah para sejarawan dikenal dengan Percobaan Besar Pertama (*al-fitnah al-kubra al-ula*). Lihat: Nurcholis Madjid dalam kata Pengantar Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, Cetakan Pertama 1985.

24 As-Suyuthi Imam, *Tarikh Khulafa'*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, Cet. I., 2001, hal: 201-202.

C. Penutup

Hubungan antara politik dan agama saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, kendati secara teknis dan praktis hubungan itu dibedakan, agama merupakan wewenang *shahibu as-Syari'ah*, sementara politik merupakan wewenang public/manusia. Akan tetapi kedua hal tersebut berjalan bersamaan seperti halnya agama Islam yang berkembang sebagai gerakan keagamaan dan politik yang pada gilirannya menyatu dengan negara dan masyarakat "*public*". Kepercayaan seorang muslim yang menganggap bahwa agama Islam merupakan hal yang menyangkut tentang keimanan dan politik serta berakar pada buku kudus agama Islam "al-Qur'an" dan hadits Nabi, sehingga muslim itu percaya bahwa hal tersebut telah tercermin dalam ajaran Islam, sejarahnya, serta perkembangan politiknya. Dari sinilah kemudian dunia Islam mengenal berbagai variasi sepanjang sejarah tentang politik dan sistem pemerintahan yang berkembang dari masa ke masa.²⁵

Politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan "agama dan politik". Dalam istilah gerakan Islam modern, Islam adalah *din wa ad-Daulah* (agama dan kekuasaan), pandangan ini didukung oleh lebih dari empat puluh referensi di dalam al-Qur'an tentang perlunya "*ketaatan kepada Allah, nabi-Nya serta orang-orang yang memegang kendali kepemimpinan* - hingga tidak sedikit intelektual muslim maupun non muslim yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan tidak mengenal kependetaan atau kelembagaan formal "gereja", akan tetapi pada zaman kejayaan imperium Muslim dinasti Umayyah dan Abbasiyah pada abad pertengahan telah berkembang struktur-struktur di luar negara yang berperan penting dalam kehidupan iman dan perilaku keagamaan.

Dalam politik Islam terdapat konsep-konsep yang sangat

25 Djazuli, Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), 34

banyak, telah dirumuskan oleh para ahli yang menekuni syari'at Islam dan orang-orang yang berminat untuk mengedepankan ajaran Islam atas pergolakan kekuasaan, hal ini juga didukung oleh al-Qur'an, diantaranya adalah konsep *khalifah* dan *khilafah*, *ummah* dan *imamah*, *syura*, *jihad*, keadilan, kesamaan derajat, perlindungan terhadap yang lemah, penjagaan hak "agama, keturunan, akal, harta dan jiwa".

Daftar Pustaka

- Abu Su'ud, Islamologi Sejarah, Aiaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia, Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2003
- Abd. Mu'in Salim, 2002, *Fiqih Siyasah:Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al*
- Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Abul A'la Al-Maududi, 1995, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan
- Abdelwahab el-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, trj. Amirudin ax-Rani, Yogyakarta : LkiS, 1994,
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PI' Raja Grafindo Persada, 2000, Cet I1,
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, Cet. V, 1986
- Nurcholish Madjid, *Islam dan Politik : Suatu Tinjauan Atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan*, dalam Paramadina; Jurnal Pemikiran Islam, v. 1., No. 1., Juli - Desember 1998,.
- Mumtaz Ahmad, 1996, *Maslah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung;Mizan,
- Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, 2010, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta:Prenada Media Grup
- Jhon L. Esposito, *Religions, Politics, and Society*, in his *Islam and Politic*, New York: Syracuse University Press, 1991,
- Metode Kritik Akal Islam: wawancara dengan Muhammad Arkoun”
Ulumul Qur'an
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2001

Jakarta: LP3ES, Cetakan Pertama 1985.

As-Suyuthi Imam, *Tarikh Khulafa'*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, Cet.
I., 2001, hal: 201-202.